

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian dan pengembangan model serta mempertajam arah penelitian. Penelitian pendahuluan bertujuan untuk mempertajam arah penelitian. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menentukan langkah-langkah sebelum melakukan penelitian, sebagaimana berikut:

1. Informasi Sumber Penting

Peneliti mendapatkan informasi melalui berita cetak maupun televisi tentang sistem pembinaan kepribadian yang dikelola dengan baik, termasuk pembinaan melalui pendidikan keagamaan Islam di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Lapas tersebut.

2. Tindak Lanjut Sumber Informasi

Setelah mendapatkan informasi dari media yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti berusaha untuk mencari tahu lebih lanjut melalui sumber lain yaitu mengunjungi web resmi dan akun sosial media Lapas Perempuan Kelas IIA Malang untuk memastikan data serta menambah referensi sumber, agar penelitian yang dilakukan lebih meyakinkan. Selain itu, peneliti juga mendapatkan informasi dari salah satu mahasiswa UMM jurusan Ilmu Komunikasi yang pernah melakukan penelitian di Lapas

Perempuan Klas IIA Malang, sehingga peneliti mengetahui prosedur untuk melakukan penelitian di dalam Lapas.

3. Mengurus Surat Izin Penelitian

Setelah mendapatkan prosedur untuk melakukan penelitian di dalam Lapas, maka peneliti meminta surat izin penelitian pada pihak kampus, yang kemudian diserahkan kepada TU Lapas Perempuan Kelas IIA Malang untuk dibuatkan surat pengajuan penelitian yang harus diserahkan kepada Kemenhumham Kanwil Jatim, hingga pada akhirnya peneliti mendapatkan pengesahan atau secara resmi diperbolehkan untuk melakukan penelitian di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang.

B. Penelitian Terdahulu

Upaya penelusuran penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu berfungsi sebagai bahan atau kritikan terkait penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan maupun kekurangannya, sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian ini. Urgensi lainnya yaitu agar tidak terjadi plagiasi dalam penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu yang sehubungan dengan apa yang dikaji penulis, dipaparkan dalam uraian berikut.

Yusra dan A. Markarma dalam penelitian yang berjudul “*Islamic Educational Transformation Through Inmate Social Interaction at Palu Correctional Facility Class II A, Central Sulawesi*”. Penelitian ini mengkaji pembinaan interaksi sosial narapidana berbasis pendidikan agama. Pembinaan tersebut diberikan agar dapat memperbaiki wawasan dan kesadaran pada nilai-nilai etika, akhlak dan moralitas narapidana dalam melakukan interaksi sosial

dan dapat diterima kembali secara wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan interaksi sosial narapidana, didasarkan pada nilai-nilai pendidikan Islam yakni sikap saling menghargai, berbagi dan memberi manfaat pada orang lain yang dikemas dalam program dan kegiatan pembinaan. Program yang diadakan layaknya pendidikan di sekolah pada umumnya, pengawasan terhadap interaksi sosial antara sesama narapidana dan petugas Lapas juga turut menjadi poin penting dalam perkembangan moral dan pendidikan spiritual.¹²

Fauzi Muharom dalam penelitian yang berjudul “Rehabilitasi Penghuni Rumah Tahanan Surakarta Melalui Pendidikan Agama”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam diwujudkan secara praktik, seperti membaca al-Qur’an, menghafal dan mentadabburi ayat setelah Dzuhur, Ashar, Isyak, dan Tarawih, namun yang masih menjadi kendala adalah malasnya para narapidana untuk aktif dalam kegiatan keagamaan yang telah ditentukan.¹³

Achmat Mubarak dalam penelitian yang berjudul “Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan Islam dalam Lapas Kelas II B Pasuruan diwujudkan melalui sistem pendidikan non-formal dan informal. Implementasi dari sistem pendidikan Islam non-formal diwujudkan melalui kegiatan pengajian, baca tulis al-Qur’an, seni *hadrah ishari* atau *al-banjari*, sholat jum’at berjama’ah, khataman al-

¹² Yusra dan A. Markarmah, *Islamic Educational Transformation....* hal. 101-102

¹³ Fauzi Muharom, “Rehabilitasi Penghuni Rumah Tahanan Surakarta Melalui Pendidikan Agama”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan (INFERENSI)*, Vol. 6, No. 2, Edisi Desember 2012, hal. 371-372

Qur'an, serta kegiatan penunjang berupa kultum. Adapun pendidikan informal diimplementasikan melalui interaksi sosial dengan sesama narapidana diwujudkan dalam kegiatan keagamaan seperti sholat berjama'ah, berdoa, diskusi tentang kajian fiqh.¹⁴

Muhammad Zakariah, dkk dalam penelitian berjudul "Pola Pengajaran dan Pendidikan Warga Binaan Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Kabupaten Kolaka dengan Adopsi Kurikulum Pondok Pesantren al-Mawaddah Warrahmah". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam dalam Rutan Klas II B Kolaka mengadopsi kurikulum pesantren al-Mawaddah Warahmah yang terletak dekat dengan lokasi di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Kabupaten Kolaka, sehingga materi yang diterapkan kepada warga binaan rutan adalah materi yang merujuk pada kitab klasik dasar, seperti: Aqidah yang bersumber dari Kitab Aqidatul Awwam, Fiqh bersumber dari Safinah Annajah dan Kifayatul Akhyar, Tafsir bersumber dari Tafsir Jalalain, Hadits bersumber dari Riyadhus Shalihin, Sejarah bersumber dari Khulasatun Nurul Yaqin dan Tarikh Tasyrik, sedangkan untuk bacaan al-Qur'an bersumber dari Pedoman Bacaan al-Qur'an Rasm Utsmani riwayat Imam Ashim. Adapun untuk metode pengajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi.¹⁵

Ahmad Fatoni dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam di Rutan Klas II B Purwodadi". Hasil dari penelitian tersebut

¹⁴ Achmat Mubarak, "Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pasuruan", *Jurnal Darussalam*, Vol. 7, No. 2, Edisi April 2016, hal. 285

¹⁵ Muhammad Zakariah, dkk "Pola Pengajaran dan Pendidikan Warga Binaan Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Kabupaten Kolaka dengan Adopsi Kurikulum Pondok Pesantren al-Mawaddah warrahmah", *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, Vol. 1, No. 1, Edisi 2018

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan agama Islam telah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kedisiplinan narapidana dalam mengikuti berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, sebagai indikasinya yaitu sebagian besar warga binaan pemasyarakatan (WBP) giat melaksanakan sholat berjama'ah, sehingga dapat dianalisa bahwa mereka juga menjalankan sholat fardhu dengan baik. Perilaku sopan yang ditunjukkan narapidana terhadap sesamanya maupun terhadap petugas rutan dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan indikasi adanya keberhasilan pembinaan agama Islam di Rutan Klas II B Purwodadi.¹⁶

Dari beberapa hasil penelitian di atas, tidaklah sama dengan skripsi ini. Penelitian ini mengkaji tentang pendidikan keagamaan Islam, ditinjau dari dasar dan tujuan diadakannya pendidikan keagamaan Islam di dalam Lapas, sehingga untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang membentuk pesantren di dalamnya, kemudian dibentuk pula kurikulum sebagai patokan dasar proses pembelajaran agama Islam, serta terdapat evaluasi sebagai bahan perbaikan di dalam proses membina narapidana melalui pendidikan keagamaan Islam yang terbentuk dalam bingkai pesantren an-Nisa.

¹⁶ Ahmad Fatoni, "Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam di Rutan Klas II B Purwodadi" (Skripsi Sarjana Pendidikan Islam UIN Walisongo, Surakarta 2017)

C. Deskripsi Teori

1. Pendidikan Keagamaan Islam Bagi Narapidana

a. Pengertian Pendidikan Keagamaan Islam

Orang-orang Yunani lebih kurang 600 SM mendefinisikan pendidikan sebagai “usaha manusia untuk menjadi manusia (memanusiakan manusia)”.¹⁷ Terdapat dua kata penting dalam kalimat tersebut, pertama “membantu” dan kedua “manusia”, dengan kata lain manusia perlu dibantu agar menjadi manusia, sehingga seseorang dikatakan telah menjadi manusia apabila telah memiliki nilai (sifat) kemanusiaan. Maka tidaklah mudah menjadi manusia, oleh karenanya tujuan dari pendidikan ialah memanusiakan manusia.

Sebelum membahas pendidikan keagamaan Islam, terkadang mayoritas masyarakat mengartikan sama antara pendidikan agama dengan pendidikan keagamaan, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Terkait pendidikan agama Islam itu sendiri, dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 55 tahun 2007 dinyatakan bahwa “Pendidikan agama merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”.¹⁸ Sementara, pendidikan

¹⁷ Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 2

¹⁸ Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat 1, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkannya.¹⁹ Maka dalam hal ini, pendidikan agama biasanya identik dengan jenjang pendidikan secara formal, sedangkan pendidikan keagamaan Islam pelaksanaannya lebih mengarah kepada kelembagaan non-formal.

Ramayulis juga mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utama kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.²⁰ Adapun pendidikan keagamaan Islam secara jelas tertuang dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Pasal 1, Nomor 13 Tahun 2014 dijelaskan bahwa "Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam".²¹

¹⁹ Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat 2, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

²⁰ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Cet Ke-4 (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hal. 21

²¹ Peraturan Menteri Agama Pasal 1 Ayat 1, Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan keagamaan Islam adalah segala upaya untuk menyiapkan peserta didik dalam suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Melalui proses tersebut peserta didik dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu menjalankan tugasnya sebagai *khalifah fil ard* (wakil Tuhan di muka bumi) dalam rangka mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian, maka pada hakikatnya pendidikan agama Islam dan pendidikan keagamaan Islam berakar dari bahasa Arab yakni “tarbiyah”, dengan akar kata *rabb* (*rabiya – yarba, rabaa – yarbu, rabba-yarubbu*) mengandung pengertian tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, mengurus, mendidik, dan juga memperbaiki.²² Merujuk kepada asal kata tersebut, maka keduanya memiliki tujuan dan fungsi yang sama, yaitu sebagai perbaikan. Oleh karenanya, pendidikan keagamaan Islam bagi narapidana mempunyai peranan penting untuk melakukan perbaikan (rehabilitasi), di mana narapidana diposisikan sebagai peserta didik yang harus dibimbing dan dibina melalui program-program pendidikan keagamaan Islam dengan tujuan untuk mengembalikan fitrah mereka sebagai manusia yang hanif dan kembali mengemban misinya sebagai khalifah di muka bumi.

²² Tim Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Materi Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG)*, Cet ke-3, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hal. 16

b. Dasar Filosofis Pendidikan Keagamaan Islam Bagi Narapidana

Pendidikan keagamaan Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa landasan filosofis, antara lain:

1) Jati Diri Manusia

Jati diri manusia adalah “hanief” yaitu condong kepada kebenaran, mentauhidkan Tuhan dan nilai-nilai luhur lainnya. Jati diri manusia tercermin dari hati nuraninya yang memihak kepada kebenaran. Manusia akan merasa bebas dan sejahtera apabila berbuat sesuai dengan isi hati nuraninya. Sebaliknya manusia akan merasa terbelenggu apabila berbuat yang bertentangan dengan hati nuraninya, suara hatinya. Pada ajaran Islam berbuat sesuai dengan hati nurani inilah yang disebut sebagai amal shaleh, amal yang mensejahterakan.²³ Senada dengan hal tersebut, Allah SWT juga telah menjelaskan dalam firman-Nya sebagaimana berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.*²⁴ (QS. ar-Rum: 30)

Kata “fitrah” pada ayat tersebut mengandung makna bahwa pada dasarnya manusia diciptakan dalam keadaan suci, yang

²³ Tobroni, *Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis, dan Spiritualitas*, Cet. Ke- 1 (Malang: UMM Press, 2008), hal. 91

²⁴ Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma, 2014), hal. 407

diasumsikan ia akan tumbuh dalam kesucian itu (seandainya tidak ada pengaruh lingkungan). Kesucian itu berasal dari hati nurani, yang mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak, dan berbuat yang baik dan benar.²⁵ Atas dasar asumsi tersebut, pada hakikatnya manusia membutuhkan agama, hal ini disebabkan agama mempunyai fungsi sebagai pembimbing, pembina, dan petunjuk arah.

Perlu kiranya dikaji kembali posisi dan peran agama bagi kehidupan umat manusia. Agama sebagai sumber nilai yang secara sosiologis diyakini kebenarannya oleh sebagian besar umat manusia mampu berperan dalam memberikan petunjuk, kekuatan moral, dan solusi-solusi tegas terhadap persoalan etik manusia.²⁶ Menurut Zakiah Daradjat, agama memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) memberikan bimbingan dalam hidup, (2) menolong dalam menghadapi kesukaran, (3) menenteramkan batin.²⁷

Berkaitan dengan nilai-nilai baik sebagai watak dasar (hanief/fitrah), manusia juga dapat melahirkan nilai-nilai buruk (*disvalues*), di mana dalam al-Qur'an disimpulkan sebagai syetan atau iblis yang digambarkan sebagai pembangkang dan selalu memperdaya manusia dan membelokkannya dari jalan yang lurus, maka manusia dibekali dengan akal pikiran dan agama yang memberikan kewajiban untuk mencari dan memilih jalan hidup yang

²⁵ Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 103

²⁶ Tobroni, *Pendidikan Islam*.... Hal. 31

²⁷ Zakiah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1973), hal. 56

lurus, benar dan baik, sehingga manusia menjadi makhluk yang etis dan moral, dengan kata lain perbuatan baik buruknya harus dipertanggungjawabkan baik di dunia (terhadap sesama manusia) dan di akhirat (di hadapan Tuhannya).

Oleh karena itu, narapidana sebagai manusia pada umumnya bukanlah seorang penjahat, akan tetapi mereka hanya tersesat, karena pada dasarnya mereka adalah “hanief”, dan apabila dilihat dari segi fitrahnya, manusia tidak menyukai kekerasan, kezaliman atau perilaku menyimpang lainnya, tetapi sebaliknya manusia mendambakan keadilan, kebenaran, kasih sayang, keharmonisan, dan lain-lain. Perilaku-perilaku menyimpang yang telah dilakukan oleh narapidana, perlu kiranya dikembalikan kepada esensi dari fitrahnya sebagai manusia, dengan demikian pembinaan kepribadian melalui pendidikan keagamaan Islam sangat berperan penting dalam membina narapidana meskipun mereka berada dalam masa tahanan.

2) Setiap Individu Berhak Memperoleh Pendidikan

Siapapun orangnya, tidak mengenal darimana dia berasal, pendidikan tetaplah menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan. Setiap individu berhak memperoleh pendidikan sejak dari buaian hingga liang lahat (meminjam istilah syair arab: “Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat”).

Pemahaman akan dunia pendidikan yang terfokus pada pendidikan formal saja tidaklah tepat, sebab konsep pendidikan

(mendidik) yang diartikan secara luas. Bila dilihat dari sisi normatif, maka ajaran Islam dari sisi muatan-muatan nilai dan norma, sangat baik dalam mendidik sekaligus membina individu dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ayat al-Qur'an maupun Hadits-hadits Nabi. Hadits yang menjelaskan tentang wajibnya mencari ilmu, misalnya tidak dibatasi oleh ras, golongan, maupun jenis kelamin. Dalam prakteknya pun terlihat bahwa pada masa Nabi tidak membedakan kesempatan belajar bagi laki-laki dan perempuan, dan tidak terdapat dikotomi dalam pendidikan, dan kalangan masyarakat terlibat aktif dalam proses pendidikan tersebut.²⁸

Mengacu pada pemaparan di atas, pendidikan keagamaan Islam yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari materi pendidikan agama Islam di sekolah pada umumnya, dalam artian pendidikan yang diterapkan tersebut tidak hanya dibantu untuk memperoleh pengetahuan saja, namun lebih kepada bagaimana pengetahuan itu dilaksanakan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan moral spiritual dalam kehidupan narapidana yang diwujudkan pada program pendidikan keagamaan Islam ini sangat penting bagi narapidana selama masa pidananya, hingga saat mereka bebas tidak lagi merasa kurang percaya diri dan tidak mengulangi kesalahan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

²⁸ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hal. 180

c. Dasar Yuridis Pendidikan Keagamaan Islam Bagi Narapidana

Dasar yuridis adanya pendidikan keagamaan Islam di lembaga pemasyarakatan mengacu pada:

- 1) Undang-undang Dasar RI 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kemudian dalam ayat 3 ditegaskan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.
- 2) Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat 1, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- 3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
- 4) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

2. Tujuan Pendidikan Keagamaan Islam Bagi Narapidana

Pembinaan narapidana tertuang dalam Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana bagi Petugas di Lapas/Rutan, di mana pembinaan narapidana dibagi menjadi 4, yaitu: 1) Pembinaan Kepribadian Bidang

Keagamaan; 2) Pembinaan Kepribadian Bidang Olahraga dan Kesenian; 3) Pembinaan Kepribadian Bidang Intelektual; 4) Pembinaan Bidang Kesadaran Bernegara.²⁹

Secara umum pembinaan narapidana dan tahanan bertujuan agar mereka dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan menambah keimanan dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar dalam hidup dan kehidupannya selama di dalam Lapas/rutan dan setelah menjalani pidananya. Pembinaan keagamaan narapidana dan tahanan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya berhasil meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan.³⁰ Maka dalam hal ini, sasaran yang perlu dibina adalah “pribadi” dan “budi pekerti” narapidana, dari sinilah sangat diperlukan suatu program ataupun kegiatan bagi narapidana yaitu melalui pendidikan keagamaan Islam.

Pembinaan melalui agama, “mungkin” dapat ditemukan nilai-nilai universal yang dapat berfungsi memberikan jawaban tentang tujuan hidup hakiki umat manusia di dunia ini, dan dapat menjadi pengendali, pengarah, serta kontrol terhadap perkembangan sistem budaya dan peradaban modern, atau sekurang-kurangnya mempunyai efek pengereman terhadap

²⁹ Kemenhumham RI, *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas/Rutan*, (Jakarta: Kemenhumham RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2013), hal. IV - V

³⁰ Kemenhumham RI, *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana* hal. 7

kecenderungan dan sifat dasar masyarakat modern yang bebas tanpa kendali tersebut.³¹

Dari uraian tersebut, pada hakikatnya tujuan pendidikan keagamaan Islam bagi narapidana yaitu agar manusia dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, sehingga menjadi insan kamil dan berakhlak mulia dengan menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.

Agama mempunyai arti peraturan Tuhan yang diberikan kepada manusia yang berisi: Sistem kepercayaan; Sistem penyembahan; dan Sistem kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.³² Hal ini diperkuat dan diperjelas oleh Emile Durkheim dalam bukunya yang berjudul *The Elementary Forms of Religions Life*, ia mengatakan bahwa agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial. Durkheim melihat agama sebagai suatu sistem simbol yang luas, yang membuat suatu kehidupan sosial menjadi tepat dengan mengungkapkan dan memelihara perasaan-perasaan atau nilai-nilai dari masyarakat.³³

Oleh karena itu, agama khususnya agama Islam tidak hanya mencakup aspek ritual yang diwujudkan dalam ibadah (vertikal) saja, namun juga mencakup aspek kemanusiaan (horizontal) yang memperhatikan sesama

³¹ Aat Syafaat, dkk, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 185

³² Syahminan Zaini, *Hakekat Agama dalam Kehidupan Manusia*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1988), hal. 23

³³ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religions Life*, terj. Inyia Ridwan Muzir dalam Judul *The Elementary Forms of Religions Life: Sejarah Bentuk-bentuk Agama yang Paling Dasar*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), hal. 99-157

manusia, inilah yang kemudian disebut sebagai humanisme Islam, maka dalam hal ini kita perlu memperhatikan kebutuhan narapidana, di mana mereka membutuhkan keperdulian yang sudah semestinya diwujudkan melalui pendidikan keagamaan Islam agar mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.

3. Materi Pendidikan Keagamaan Islam Bagi Narapidana

Secara garis besar, materi agama Islam terbagi menjadi tiga, yaitu: keyakinan (*aqidah*), norma (*syariat*), dan pelaku (*akhlak/behavior*).³⁴ Ketiga hal tersebut saling berkaitan untuk membentuk kepribadian muslim secara keseluruhan.

a. Aqidah

Aqidah adalah aspek keyakinan terhadap keyakinan Islam, yaitu berupa rukun iman (iman kepada Allah, Malaikat, kitab-kitab, para Rasul dan Nabi, tentang hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar Allah). Akidah merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam, karena merupakan dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan seseorang yang wajib dimiliki untuk dijadikan pijakan dalam segala sikap dan tingkah laku sehari-hari. Akidah secara umum ialah sesuatu yang dianut oleh manusia dan diyakininya, berwujud agama atau lainnya. Sedangkan Akidah

³⁴ Wiji Suwarno, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2009), hal. 36-37

muslim adalah suatu agama yang dianut oleh orang muslim dengan perantara dalil-dalil yang yakin (Al-Quran dan As-Sunnah).³⁵

b. Syariat

Syariat ialah apa-apa yang disyariatkan atau dimestikan oleh agama atau lainnya bagi seseorang untuk di laksanakan, berupa peraturan dan hukum-hukum sebagai manifestasi atau konsekuensi dari akidah³⁶

Syariat Islam adalah sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam lainnya. Kaidah syariat Islam ini secara garis besar di bagi menjadi dua bagian, yaitu: a) Kaidah ibadah, yaitu tatacara/aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan tuhan, tatacaranya telah ditentukan dalam al-Quran dan Sunnah Rasul. Diantaranya bersuci, shalat, zakat, puasa dan haji; b) Kaidah mu'amalah, yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam. Mu'amalah dalam arti luas antara lain: hukum niaga, hukum nikah, hukum waris, jinayah, *khilafah jihad* dan lain sebagainya.³⁷

c. Akhlak

Definisi akhlak secara etimologi berasal dari kata *khalaqa* yang berarti mencipta, membuat, menjadikan. *Khuluqun* yang berarti perangai, tabiat, adat. *Khalqun* yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Secara

³⁵ Zainal Arifin Djamaris, *Islam Aqidah dan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 19

³⁶ Ibid, hal. 19

³⁷ Nina Aminah, *Studi Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 53

etimologi akhlak berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.³⁸

Akhlak Islam adalah akhlak dalam kehidupan sehari-hari, akhlak yang baik atau akhlakul karimah adalah sistem nilai yang menjadi asas perilaku yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan nilai-nilai alamiah (*sunnatullah*).³⁹

4. Metode Pendidikan Keagamaan Islam Bagi Narapidana

Metode pengajaran materi agama Islam adalah suatu cara menyampaikan bahan pelajaran agama Islam, atau diartikan sebagai cara yang khusus dan telah dipersiapkan serta dipertimbangkan untuk ditempuh dalam pengajaran keimanan, ibadah, akhlak dan berbagai mata pelajaran agama Islam lainnya.⁴⁰ Apabila metode tepat dalam penggunaannya, maka akan memudahkan daya tangkap peserta didik dalam menerima materi.

Drs. CI. Harsono Hs, Bc. Ip membagi metode pembinaan agama bagi narapidana menjadi lima, antara lain:⁴¹

³⁸ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal.3

³⁹ Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 31

⁴⁰ Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 1

⁴¹ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hal. 377

a. Metode Pembinaan Berdasarkan Situasi

Narapidana atau orang biasa sekalipun akan mempunyai kecenderungan untuk terpengaruh situasi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah situasi itu adalah alam, sosial, kejiwaan atau yang lain. Pembinaan berdasarkan situasi (*Situational Treatment Method*) harus mampu merubah cara berpikir narapidana untuk tidak tergantung terhadap situasi tetapi menguasai situasi.

b. Pembinaan Perorangan (*Individual Treatment*)

Pembinaan perorangan diberikan secara individual oleh petugas pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah sendiri-sendiri, tetapi dapat dibina secara kelompok dan penanganannya sendiri-sendiri.

c. Pembinaan Secara Kelompok (*Classical Treatment*)

Pembinaan secara kelompok dapat dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim. Pemilihan metode tergantung kepada materi yang akan disajikan, tujuan yang hendak dicapai dan proses pembinaan.

d. Belajar dari Pengalaman (*Experiential Learning*)

Pembinaan berdasarkan pengalaman narapidana, atau narapidana diminta belajar dari pengalaman. Dalam pembinaan narapidana, sejumlah pengalaman dapat kita susun sebagai materi dari pembinaan. Salah satu hal yang paling penting dalam belajar dari pengalaman baru, baik pengalaman diri sendiri atau orang lain.

e. Auto Sugesti

Auto sugesti adalah sarana atau alat untuk mempengaruhi bawah sadar manusia dengan cara memasukkan saran-saran atau pengaruh atau perintah, untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran yang diberikan.

5. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Keagamaan Islam

Secara umum, evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang terdapat di lembaga formal dibagi atas empat jenis, antara lain:⁴²

a. Evaluasi Formatif

Penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program dalam satuan materi pokok pada suatu bidang studi tertentu.

b. Evaluasi Sumatif

Penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran dalam satu caturwulan semester, atau akhir tahun.

c. Evaluasi Penempatan (*Placement*)

Penilaian tentang pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik.

⁴² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal. 227-229

f. Evaluasi Diagnostik

Penilaian yang dilakukan terhadap hasil penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik baik merupakan kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam proses pembelajaran.

6. Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Pengertian narapidana dari dua suku kata yaitu “Nara” artinya orang, dan “Pidana” artinya hukuman dan kejahatan (pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, narkoba, korupsi, dan sebagainya), sehingga narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana.⁴³ Menurut pengertian lain dijelaskan bahwa narapidana adalah anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan diproses selama waktu tertentu dalam lingkungan atau tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan.⁴⁴

Istilah narapidana ini juga dapat diartikan sebagai seseorang yang telah kehilangan kemerdekaannya, sehingga selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.⁴⁵ Selaras dengan hal tersebut, pengertian narapidana juga tercantum pada UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 5 dan 7 Tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa

⁴³ Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemendiknas RI, 2013), hal. 9

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 48

⁴⁵ A. Widiada Gunakaya, SA, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung: CV Armico, 1988), hal. 78

“Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”.⁴⁶ Adapun Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya narapidana mempunyai kebebasan atau kemerdekaan dalam hidupnya, akan tetapi karena pelanggaran yang dilakukannya, maka ia terjerat dengan hukum pidana dan membuatnya harus mendekam dalam masa tahanan di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Narapidana atau istilah lainnya warga binaan pemasyarakatan (WBP) tidaklah berbeda dengan manusia lainnya, sehingga tidak harus diberantas atau dimusnahkan, yang seharusnya dimusnahkan adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dan melanggar hukum, agama, kesusilaan dan kewajiban sosial lainnya.

b. Hak-hak Narapidana

Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa narapidana sesungguhnya mempunyai kemerdekaan, meskipun kemerdekaan itu hilang karena masa pidananya dalam lembaga pemasyarakatan, maka dalam hal ini narapidana tetap mempunyai hak-hak nya sebagaimana fitrahnya sebagai manusia.

⁴⁶ Undang-undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 5

⁴⁷ Ibid., Pasal 1 Ayat 7

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki dua pengertian dasar, Pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.⁴⁸

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa narapidana berhak:

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) menyampaikan keluhan
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

⁴⁸ Syahrudin, "Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri", (Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unhas, Makassar 2010), hal. 11

- 9) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 10) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 11) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun materi HAM narapidana menurut pedoman PBB mengenai *standard minimum rules* untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman, antara lain:⁴⁹

- 1) Buku register
- 2) Pemisahan kategori napi
- 3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
- 4) Fasilitas sanitasi yang memadai
- 5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet
- 6) Pakaian dan tempat tidur yang layak
- 7) Makanan yang sehat
- 8) Hak untuk berolahraga di udara terbuka
- 9) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner
- 10) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan
- 11) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana

⁴⁹ United Nations, "Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners: Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders", (Geneva, 13 Mei 1977), hal. 1-14

- 12) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
- 13) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar
- 14) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik
- 15) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama
- 16) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga
- 17) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

7. Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan berasal dari kata “lembaga” dan “pemasyarakatan”. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa “Pemasyarakatan yang dimaksud adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Adapun sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan dan

memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.⁵⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu tempat untuk menampung dan membina manusia yang dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang melanggar hukum hingga diputuskan oleh hakim dengan pidana penjara. Oleh karenanya, lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan (hukum) yang pada realitanya tidak mempersoalkan, apakah seseorang terbukti bersalah atau tidak.⁵¹ Lebih ringkasnya, lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pemaparan di atas mungkin memunculkan pertanyaan “mengapa dinamakan Lapas?”, dan “mengapa tidak dinamakan penjara?”. Hal ini tidak lain karena bangsa Indonesia menganut asas pancasila, sehingga sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia berbeda dengan sistem kepenjaraan yang dianut oleh bangsa luar terutama negara-negara Barat yang berasaskan liberalisme atau individualisme, maka berbeda pula sistem pemidanaan dengan negara Indonesia yang berasaskan sosialisme atau kolektifisme. Dikarenakan negara Indonesia berasaskan pancasila,

⁵⁰ Undang-undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 Pasal 1

⁵¹ Petrus Irwan P dan Simonangkis Pandapotan..., hal. 63

maka pemidanaan tidak lagi sekedar penjaraan, namun mempunyai unsur rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Sistem pemasyarakatan sangat berbeda dengan sistem pemenjaraan, di mana sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang tidak diiringi dengan unsur rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.⁵²

Oleh karena itu, sistem pembinaan di Lapas / Rutan memegang teguh Asas Sistem Pemasyarakatan yaitu: 1) Pengayoman; 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan; 3) Pendidikan; 4) Pembimbingan; 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia; 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁵³

b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, terkait pemahaman fungsi lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang memakai sistem

⁵² Undang-undang RI No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Penjelasan UU RI Tentang Pemasyarakatan, hal. 26

⁵³ Ibid, hal. 5-6

pemasyarakatan, atau lebih detailnya sistem pemasyarakatan yang diterapkan itu sebagai metode dan pemasyarakatan sebagai proses. Sehubungan dengan sistem pemasyarakatan yang dipakai sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.

